



PEMERINTAH KOTA PASURUAN



LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA PASURUAN | 2018

*"Bunga kelapa (manggar) kalau jadi kelapa semua yang tak kuat pohonnya,
atau buahnya jadi kecil-kecil.
Sudah menjadi Sunnatullah"*

Kiai Hamid bin Abdullah

**Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota Pasuruan**



Jalan Pahlawan Nomor 28
Kota Pasuruan



organisasi@pasuruankota.go.id



(0343) 426604 -
(0343) 426919



(0343) 425697



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Pasuruan Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu instrumen dalam upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Pasuruan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparansi, dan berorientasi pada hasil, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kami berupaya untuk menyelenggarakan pemerintahan seperti diatas dengan berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang didalamnya mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan sekaligus kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka usaha pencapaian misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah dan dilaporkan secara periodik.

Secara garis besar laporan kinerja instansi pemerintah ini disusun sebagai media pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja serta Perubahannya Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2018. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan supaya lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi dalam pelaksanaannya. Semoga Kota Pasuruan bisa lebih baik lagi kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pasuruan, Pebruari 2019
WAKIL WALIKOTA PASURUAN

RAHARTO TENO PRASETYO, ST



DAFTAR ISI

REVIU INSPEKTORAT	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kondisi Geografis Kota Pasuruan	3
D. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	4
E. Isu Strategis Pemerintah Kota Pasuruan	11
F. Sistematika Penyusunan	11
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis	12
B. Indikator Kinerja Utama	15
C. Perjanjian Kinerja	17
D. Perencanaan Anggaran	26
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan.....	27
B. Akuntabilitas Keuangan	91
BAB 4 PENUTUP	40
A. KESIMPULAN	40
B. SARAN	41
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD	13
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	15
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017	18
Tabel 3.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan	28
Tabel 3.2. Perbandingan Indeks Pendidikan Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan	30
Tabel 3.3. Perbandingan Indeks Kesehatan Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan	32
Tabel 3.4. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional, Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan	34
Tabel 3.5. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan	35
Tabel 3.6. Perbandingan Indeks Gini Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan	36
Tabel 3.7. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan	37
Tabel 3.8. Perbandingan IKLH Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan	38
Tabel 3.9. Perbandingan IPM Propinsi Jatim dan Kota Pasuruan	42
Tabel 3.10. Realisasi Indikator Kinerja Tambahan Pemerintah Kota Pasuruan	43
Tabel 3.11. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1	50
Tabel 3.12. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2	51
Tabel 3.13. Daftar Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	53
Tabel 3.14. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3	53
Tabel 3.15. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4	55
Tabel 3.16. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5	56
Tabel 3.17. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6	57
Tabel 3.18. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7	58
Tabel 3.19. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8	59
Tabel 3.20. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9	59
Tabel 3.21. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10	60
Tabel 3.22. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11	61
Tabel 3.23. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 12	62
Tabel 3.24. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 13	64
Tabel 3.25. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 14	65
Tabel 3.26. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 15	66



Tabel 3.27. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16.....	67
Tabel 3.28. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 17.....	69
Tabel 3.29. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 18.....	70
Tabel 3.30. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 19.....	72
Tabel 3.31. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 20.....	73
Tabel 3.32. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 21.....	74
Tabel 3.33. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 22.....	75
Tabel 3.34. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23.....	76
Tabel 3.35. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 24.....	77
Tabel 3.36. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 25.....	78
Tabel 3.37. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 26.....	80
Tabel 3.38. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 27.....	81
Tabel 3.39. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 28.....	82
Tabel 3.40. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 29.....	83
Tabel 3.41. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 30.....	84
Tabel 3.42. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 31.....	87
Tabel 3.43. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 32.....	88
Tabel 3.44. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 33.....	89
Tabel 3.45. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 34.....	89
Tabel 3.46. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 35.....	90
Tabel 3.47. Tabel Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2017.....	92
Tabel 3.48. Alokasi dan Realisasi APBD Kota Pasuruan Tahun 2017.....	95
Tabel 4.1 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja.....	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Kota Pasuruan	3
Gambar 3.1. Gebyar PAUD Kota Pasuruan Tahun 2017	31
Gambar 3.2. Sosialisasi Pendidikan Inklusi Kota Pasuruan	31
Gambar 3.3. Penyerahan P2D di Propinsi Jawa Timur	31
Gambar 3.4. Pembongkaran Jamban di sungai-sungai di wilayah Kota Pasuruan.....	33
Gambar 3.5. Pencanaan Kelurahan Bebas Buang Air Besar Sembarangan	33
Gambar 3.6. Sosialisasi Penyakit Tidak Menular	33
Gambar 3.7. Pembagian Kartu Tani	38
Gambar 3.8. Koordinasi Bidang Ekonomi	38
Gambar 3.9. Penyerahan KIA	41
Gambar 3.10. Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi	41
Gambar 3.11. Pendampingan Perbaikan SAKIP dengan Kemenpan RB	41
Gambar 3.12. MoU Kerjasama dengan Polres Pasuruan Kota	42



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Pasuruan sebagai penyelenggara Pemerintahan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki 2 (dua) fungsi yaitu :

1. Informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat, dan ;
2. Informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja pemerintah Kota Pasuruan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No.6 tahun 2016 yang menjabarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih kedalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Oleh karenanya seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2018 perlu evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Untuk mewujudkan Visi “Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri”, melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yang merupakan tujuan dasar pembangunan Walikota dan Wakil Walikota dalam masa pemerintahannya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya, oleh karenanya Pemerintah Kota Pasuruan telah menetapkan Indikator Kinerja dalam setiap Sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan untuk merepresentasikan dari integritas pembangunan di Kota Pasuruan selama 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021). Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2018, masih terdapat beberapa IKU yang belum bisa memenuhi target, antara lain :



1. Indeks Pendidikan
2. Indeks Kesehatan
3. Indeks Demokrasi

Selebihnya, IKU Pemerintah Kota Pasuruan telah melampaui target pembangunan Tahun 2018.

Adapun IKU tersebut sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Tingkat Kemiskinan
4. Indeks Gini
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
6. Indeks Reformasi Birokrasi

Secara umum, Pemerintah Kota Pasuruan telah berhasil mengatasi permasalahan pengangguran terbuka dan penduduk miskin, akan tetapi pertumbuhan ekonomi masih melambat karena pengaruh melambatnya pertumbuhan ekonomi secara nasional dan internasional.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, terdapat 24 (dua puluh empat) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan yang harus ditangani Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi ini dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2018 ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang timbul dan mungkin akan timbul (deteksi dini) menyangkut kondisi internal, kondisi eksternal baik regional, nasional maupun internasional dan merupakan bentuk dokumentasi pertanggungjawaban tahunan dengan berdasarkan pada :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999;
2. Peraturan Menteri Pendahayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; dan



3. Surat Keputusan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) Nomor 239 Tahun 2003.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2018 merupakan capaian kinerja tahun ketiga dari RPJMD periode 2016-2021, dimana target kinerja telah ditetapkan dan disetujui oleh Kepala Daerah sebagai penanggungjawab dalam bentuk perjanjian kinerja yang telah disesuaikan perubahannya karena adanya perubahan anggaran. Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Pasuruan tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kota Pasuruan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.



Adapun **Tujuan** dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Pasuruan tahun 2018 ini antara lain sebagai berikut :

1. Mendorong Pemerintah Kota Pasuruan untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Pasuruan;
2. Menjadikan Pemerintah Kota Pasuruan yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tenang, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pasuruan guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kota Pasuruan terhadap penyelenggara Pemerintah Kota Pasuruan.

Laporan Kinerja disusun secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan serta target yang diperjanjikan dan ditetapkan setiap Perangkat Daerah. Sebagai alat pendorong terwujudnya *good governance* dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.3 Kondisi Geografis Kota Pasuruan

a. Wilayah Administratif

Kota Pasuruan secara astronomis terletak antara 112°45"-112°55" Bujur Timur dan 7°35" 7°45" Lintang Selatan, dan secara administratif wilayah Kota Pasuruan berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan

Sebelah Selatan : Kecamatan Pohjentrek dan Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan

Sebelah Barat : Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan

Adapun pemetaan wilayah administratif Kota Pasuruan berdasarkan pembagian luas wilayah Kecamatan bisa dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.1. Peta Wilayah Kota Pasuruan

b. Luas Wilayah

Wilayah Kota Pasuruan tergolong relatif kecil yaitu seluas 35,29 Km² atau 0,07% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara Administrasi Kota Pasuruan terdiri dari 4 Kecamatan dengan 34 Kelurahan, meliputi :

1. Kecamatan Gadingrejo

- Bukir
- Gadingrejo
- Gentong
- Karangketug
- Krapyakrejo
- Petahunan
- Randusari
- Se bani

2. Kecamatan Purworejo

- Kebonagung
- Pohjentrek
- Purutrejo
- Sekargadung
- Tembokrejo
- Purworejo
- Wirogunan

3. Kecamatan Panggungrejo

- Bangilan
- Bugul Lor
- Kandang Sapi
- Karanganyar
- Kebonsari
- Mandaranrejo
- Mayangan
- Ngemplakrejo
- Panggungrejo
- Pekuncen
- Petamanan
- Tambaan
- Trajeng



4. Kecamatan Bugul Kidul

- Bakalan
- Blandongan
- Bugul Kidul
- Kepel
- Krampyangan
- Tapaan

c. Topografi Wilayah

Kota Pasuruan secara umum merupakan wilayah pesisir, dengan ketinggian rata-rata ± 4 m diatas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Pasuruan memiliki tingkat kemiringan antara 0-1 persen, yang melandai dari selatan ke utara; di sebelah utara terdapat bagian yang agak cekung sehingga pembuangan airnya lambat.

Proses pembentukan tanah di Kota Pasuruan didominasi oleh proses sedimentasi yang dihasilkan oleh tiga sungai yang melintas di Kota Pasuruan, yakni: Sungai Gembong, Sungai Petung dan Sungai Welang. Tanah tersebut dikenal dengan tanah aluvial, yaitu tanah yang berasal dari pengendapan atau sedimentasi aliran air permukaan. Lokasi pembentukan tanah aluvial umumnya terjadi di daerah yang berbatasan dengan garis pantai dan lahan yang berada di sekitar muara sungai. Tanah hasil sedimentasi tersebut, sebagian besar dimanfaatkan sebagai areal tambak dan mangrove.

1.4 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

a. Kelembagaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan asas :

1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
3. Efisiensi;
4. Efektivitas;
5. Pembagian habis tugas;
6. Rentang kendali;
7. Tata kerja yang jelas; dan
8. Fleksibilitas.

Dari hasil pemetaan kelembagaan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Pasuruan, terdapat beberapa Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Pasuruan, diantaranya :

No.	Urusan Pemerintahan Daerah
1.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Energi dan Sumber Daya Mineral



No.	Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Inspektorat
4.	Kearsipan
5.	Kebudayaan
6.	Kehutanan
7.	Kelautan dan Perikanan
8.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
9.	Kepemudaan dan Olahraga
10.	Pariwisata
11.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.	Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14.	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.	Pendidikan
16.	Penelitian dan Pengembangan
17.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18.	Perdagangan
19.	Perencanaan
20.	Kesehatan
21.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
22.	Keuangan
23.	Komunikasi dan Informatika
24.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
25.	Lingkungan Hidup
26.	Pangan
27.	Perhubungan
28.	Perindustrian
29.	Perpustakaan
30.	Persandian
31.	Pertanahan
32.	Pertanian
33.	Perumahan dan Kawasan Permukiman
34.	Sosial
35.	Statistik
36.	Tenaga Kerja
37.	Transmigrasi

Dari sejumlah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pasuruan diatas, Pemerintah Kota Pasuruan melakukan pemetaan terhadap semua urusan untuk membentuk Perangkat Daerah yang mampu urusan tersebut dengan pertimbangan asas-asas pembentukan Perangkat Daerah.

Dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektifitas dalam pembentukan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Pasuruan dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, membentuk Perangkat Daerah antara lain :



a. Dinas Daerah

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Dinas Sosial
6. Dinas Tenaga Kerja
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
8. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17. Dinas Perikanan
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19. Satuan Polisi Pamong Praja

b. Badan Daerah

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
2. Badan Kepegawaian Daerah
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
4. Badan Pendapatan Daerah

c. Sekretariat Daerah

d. Sekretariat DPRD

e. Inspektorat

f. Kecamatan

g. Perangkat Daerah yang tidak dirubah :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. RSUD Dr. R. Soedarsono

b. Struktur Organisasi



Keterangan garis :

-  Garis Komando
-  Garis Hubungan Kemitraan dan Pertanggungjawaban
-  Garis Koordinasi

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk menjabarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang diampu, maka disusunlah Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota mengenai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Secara umum Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan



tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3) Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Dinas Daerah

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

5) Badan Daerah

Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;



- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugasdukungan teknis sesuai denganlingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsipenunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

6) Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan.

Kecamatan mempunyai tugas antara lain :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Kecamatan. Kelurahan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan di Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan kompetensi. Dalam pengelolaan data kepegawaian, Kota Pasuruan menggunakan

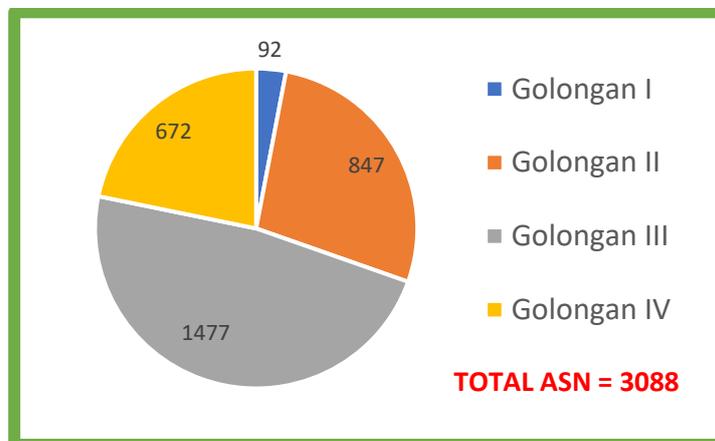
Sistem Informasi Manajemen ASN Kota Pasuruan (Si Maskot) yang dilakukan secara online, sehingga mempermudah proses pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Adapun aplikasi Si Maskot ini bisa diakses pada halaman <http://202.148.24.10/simpeg/login> dan untuk tampilan aplikasinya bisa dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.2 Sistem Informasi Manajemen ASN Kota Pasuruan

Untuk kondisi sumber daya manusia / kepegawaian Pemerintah Kota Pasuruan secara umum dapat digambarkan pada grafik dibawah ini :

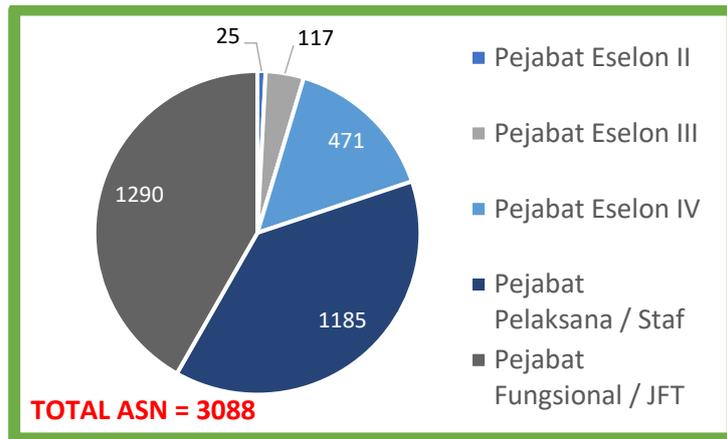
Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2018



Sumber Data : Data Pegawai Kota Pasuruan (BKD)

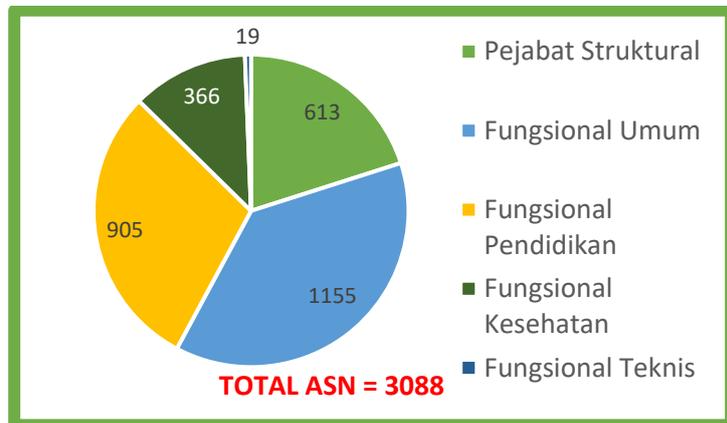


Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon per 31 Desember 2018



Sumber Data : Data Pegawai Kota Pasuruan (BKD)

Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan per 31 Desember 2018



Sumber Data : Data Pegawai Kota Pasuruan (BKD)

1.5 Isu Strategis Pemerintah Kota Pasuruan

Sebagai sebuah wilayah yang menjadi bagian dari Propinsi Jawa Timur, selain berinteraksi dengan sesama daerah regional, Kota Pasuruan tidak menutup kemungkinan berinteraksi dengan dunia internasional. Keberadaan Kota Pasuruan juga tidak bisa terlepas dengan dinamika yang terjadi di dalam lingkungannya. Sehingga semua keadaan dalam negeri dan luar negeri akan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan Kota Pasuruan kedepan. Dari beberapa kondisi yang mempengaruhi perkembangan Kota Pasuruan terdapat isu-isu strategis yang perlu di selesaikan satu per satu, diantaranya :

1. *Isu Narkoba*

Narkotika juga menjadi isu yang cukup relevan bagi Kota Pasuruan, dimana beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika.

2. *Isu Pasar Tunggal*

Pasar tunggal atau MEA merupakan pasar bersama dalam suatu kawasan Asia Tenggara yang mana aturan dan kebijakannya dibentuk bersama, ekspor impor pun dilakukan bersama- sama sehingga tidak lagi kepada masing- masing Negara dalam proses perdagangan internasional. MEA mengatur single market untuk 5 sektor, yakni: barang, jasa, modal, investasi dan tenaga kerja terlatih. Kota Pasuruan akan jauh tertinggal kalau tidak segera memperbaiki kualitas barang dan jasa yang menjadi tonggak utama perekonomian daerah

3. *Isu Kemiskinan dan Pengangguran*

Kurang optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pasuruan antara lain disebabkan oleh belum tersedianya data kemiskinan yang valid dan terintegrasi, terbatasnya pendanaan, belum sinergisnya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan antar pemangku kepentingan, dan belum optimalnya peran dunia usaha/swasta.

4. *Isu Pendidikan dan Kesehatan*

Kebijakan pemerintah untuk mengalihkan kewenangan pendidikan menengah atas dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, menimbulkan pertanyaan sejumlah kelompok masyarakat mengenai keberlanjutan pendidikan gratis di Kota Pasuruan, khususnya untuk SMA/SMK. Kegundahan sebagian kelompok ini, dirasa cukup wajar mengingat pendidikan gratis di Kota Pasuruan sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Dari urusan kesehatan, ada beberapa fokus penanganan kesehatan di masyarakat, antara lain : memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat dengan upaya promotif dan preventif serta perbaikan kualitas layanan sarana kesehatan yang ada di wilayah Kota Pasuruan.



5. *Isu Lingkungan*

Tingginya tingkat pembangunan di Kota Pasuruan mengakibatkan antara lain bertambahnya luas lahan terbangun dan produksi polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan.

6. *Isu Infrastruktur*

Pembangunan infrastruktur merupakan upaya meningkatkan peran dan penanganan infrastruktur dalam keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah, baik antara pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, seperti upaya penanganan jalan dan jembatan, penanganan banjir, pembangunan pelabuhan, transportasi massal dan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan tanah.

7. *Isu Ekonomi Kreatif*

Kota Pasuruan memiliki potensi yang menjanjikan untuk menjadi kota kreatif. Setidaknya, terdapat 3 sektor industri kreatif di Kota Pasuruan yakni: (i) desain; (ii) kerajinan tangan/kriya; dan (iii) cor logam. Harus diakui, eksistensi dan perkembangan industri kreatif di Kota Pasuruan relatif tertinggal bila dibandingkan dengan kota-kota lain, yang lebih mapan eksistensi industri kreatifnya, misal: Kota Yogyakarta, Kota/Kabupaten di Provinsi Bali maupun Kota Bandung.

8. *Isu Reformasi Birokrasi*

Tingkat pencapaian indeks reformasi birokrasi Kota Pasuruan yang masih rendah daripada daerah-daerah lain. Hal ini merupakan permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada beberapa fokus perbaikan kualitas reformasi birokrasi pemerintah Kota Pasuruan, diantaranya keterbukaan informasi publik, peningkatan akuntabilitas kinerja, penerapan sistem informasi dalam segala bidang, perbaikan kualitas pelayanan publik, dll.

9. *Isu Perlindungan Anak*

Masih banyaknya pekerja anak, perkawinan anak dibawah umur, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Angka Kematian Bayi, Anak dengan gizi buruk, kekerasan terhadap anak (termasuk kekerasan seksual), trafficking dan sebagainya.

10. *Isu Manajemen dan Pelayanan RSUD*

Rumah sakit umum daerah (RSUD) dr Soedharsono adalah satu-satunya rumah sakit di Kota Pasuruan. Wajar apabila masyarakat begitu berharap dan menuntut banyak hal terkait layanan kesehatan terhadap rumah sakit ini. Begitu banyak keluhan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit, mulai dari dokter jaga yang tidak disiplin, pelayanan yang kurang ramah, kurangnya transparansi tarif layanan, kapasitas kamar yang overload, hingga ketersediaan prasarana dan

sarana layanan kesehatan yang jauh dari kata memadai. Buruknya layanan kesehatan di rumah sakit ini juga diikuti dengan buruknya manajemen pengelolaan rumah sakit.

1.6 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2018 terdiri dari 4 (Empat) BAB yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah perencanaan dari sebuah pemerintahan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun masa kerja kepala daerah terpilih, dimana didalam perencanaan tersebut akan dituangkan secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Penyusunan RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih



mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka dapat dilihat untuk perencanaan tahun 2018 yang merupakan tahun ke tiga pelaksanaan RPJMD Kota Pasuruan, seperti dijelaskan sebagai berikut :

Visi
Misi

Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri

Misi
Misi

- 1** Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau
- 2** Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat
- 3** Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif
- 4** Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak
- 5** Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan
- 6** Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik
- 7** Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial



Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
MISI I Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau	Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter	Meningkatnya keterjangkauan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas
		Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan terjangkau
		Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
MISI II Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat	Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak
		Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal
		Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan
MISI III Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi	Menurunnya tingkat pengangguran
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
		Menurunnya angka kemiskinan
		Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan
		Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)
		Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga
Meningkatnya nilai investasi dan jumlah izin yang diterbitkan		
MISI IV Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak	Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif	Meningkatnya peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian
		Meningkatnya kinerja perdagangan
		Meningkatnya upaya perlindungan konsumen
		Meningkatnya kinerja sektor industri, utamanya melalui pembinaan industri rumah tangga
		Meningkatnya kunjungan wisata yang disertai dengan perbaikan fasilitas pelayanan kepariwisataan
		Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan)
		Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat
		Meningkatnya penyerapan pangan
MISI V Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan drainase
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak
		Meningkatnya upaya perlindungan kelestarian lingkungan hidup
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
		Meningkatnya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan
MISI VI Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Kota Pasuruan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya pengelolaan dan tertib kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil



MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
MISI VII Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial	Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
		Terbangunnya suasana lingkungan yang aman dan tertib
		Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang didukung dengan ketangguhan penanggulangan bencana
		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM dalam kerangka wawasan kebangsaan
		Meningkatnya upaya pelestarian artefak dan nilai-nilai budaya serta tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial

Dalam perkembangannya, RPJMD Kota Pasuruan tahun 2016-2021 telah mengalami penyesuaian-penyesuaian. Hal ini dilakukan karena Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran RPJMD dianggap terlalu sempit atau rendah, sehingga perlu dirubah. Untuk draft perubahannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Tabel Perubahan RPJMD

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
MISI I Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau	Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas Pendidikan
MISI II Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
MISI III Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi	Meningkatnya kesempatan kerja
MISI IV Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak	Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif	Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa
		Menurunnya kemiskinan
MISI V Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana perekonomian dan sosial
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
MISI VI Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
		Menurunnya ketergantungan keuangan daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik



MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
MISI VII Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial	Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya kerukunan masyarakat Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat

Draft perubahan RPJMD ini sudah diajukan ke DPRD untuk dibahas, tinggal menunggu pengesahannya, sehingga dapat dijadikan dasar penyusunan proses perencanaan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan disisa tahun RPJMD tahun 2016-2021.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur keberhasilan kinerja sebuah instansi pemerintah. Penyusunan IKU sendiri berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah wajib memiliki indikator kinerja sebagai bentuk pengukuran keberhasilan kinerjanya.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pasuruan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tabel Indikator Kinerja Utama Kota Pasuruan

MISI	TUJUAN	IKU	FORMULA
MISI I Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau	Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter	Indeks pendidikan	$= \frac{2}{3} \text{ Indeks Lit} + \frac{1}{3} \text{ Indeks MYS}$ Indeks Lit = indeks literasi (melek huruf) Indeks MYS = Indeks rata-rata lama sekolah
MISI II Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat	Indeks kesehatan	Dihitung dengan Metode Brass dan Varian Trussel, dengan menggunakan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup yang dilaporkan dari tiap kelompok ibu-ibu umur 15-49 tahun



MISI III Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi	Tingkat kemiskinan	= $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
		Tingkat pengangguran terbuka	= $1 - \frac{\text{Angk Kerja yang Bekerja}}{\text{Angkatan Kerja}}$
		Indeks gini	= $1 - \sum f_i (y_i + y_i - 1)$ fi = Jumlah persen pendapatan kelas ke-i yi = Jumlah kumulatif persen pendapatan pada kelas ke-i
MISI IV Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak	Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi	= $\frac{\text{PDRB ADHB}_{n} - \text{PDRB ADHB}_{n-1}}{\text{PDRB ADHB}_{n-1}}$
MISI V Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	= $(\text{IPAx}30\%)+(\text{IPUx}30\%)+(\text{ITHx}40\%)$ IPA = Indeks pencemaran air IPU = Indeks pencemaran udara ITH = Indeks tutupan lahan
MISI VI Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
MISI VII Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial	Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks demokrasi	= Perhitungan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun) berkaitan dengan: 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan yang telah disetujui dan disahkan oleh Walikota Pasuruan dapat dilihat pada **Lampiran 2**.



2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disusun dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2018 telah ditetapkan pada tanggal 1 Pebruari 2018 dan telah dilakukan revisi dan perubahan pada tanggal 31 Oktober 2018 sehubungan instruksi Bapak Wakil Walikota karena adanya perubahan anggaran sehingga ada beberapa perubahan pada target kinerja dari target sebelumnya. Adapun Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2018 seperti dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Pasuruan tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	KET
Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68	0,68	IKU
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	82,8	82,8	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	100	100	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	83,43	83,43	
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,6	10,6	
	Harapan Lama Sekolah	13,61	13,61	
	Nilai Rata-rata Ujian Jenjang Pendidikan SD	70	70	
	Nilai Rata-rata Ujian Jenjang Pendidikan SMP	70	70	
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	79,04	79,04	IKU
	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,27	71,27	
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,87	5,87	IKU
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,43	67,43	
Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa	Pertumbuhan Ekonomi	5,47	5,47	IKU
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor industri	11,45%	11,45%	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor perdagangan	11,28%	11,28%	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor jasa	13,17%	13,17%	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor pertanian dan perikanan	9,12%	9,12%	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	KET
Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	7,45	7,45	IKU
	Indeks kedalaman kemiskinan	1,31	1,00	
	Indeks keparahan kemiskinan	0,26	0,15	
	Indeks Gini	0,38	0,38	IKU
Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana perekonomian dan sosial	Persentase jalan dan sarana pendukungnya dalam kondisi mantap	54,48	54,48	
	Cakupan layanan air bersih	94,87	94,87	
	Persentase Kawasan Kumuh	5,23%	5,23%	
	Cakupan layanan sanitasi	94,45	94,45	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,67	66,00	IKU
	Persentase Ruang Terbuka Hijau	23,47%	23,47%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	50	60	IKU
	Predikat SAKIP Kota	A	BB	
	Tingkat kematangan SPIP	Berkembang	Berkembang	
	Opini BPK atas LKD	WTP	WTP	
Menurunnya ketergantungan keuangan daerah	Rasio ketergantungan keuangan daerah	84,22	84,22	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,23	82,23	
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase potensi konflik ipoleksosbud yang ditangani	10%	10%	
	Indeks Demokrasi	64,12	64,12	IKU
Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	63,78%	63,78%	
	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	12,47%	12,47%	

Instruksi perubahan target kinerja dari Perjanjian Kinerja Walikota tahun 2018 karena adanya perubahan anggaran tahun 2018, sebagaimana Surat Wakil Walikota dapat dilihat pada **Lampiran 3**.



2.4 Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2018 mengalami perubahan, diawal tahun yang didukung oleh 138 Program dengan anggaran sebesar Rp. 1.006.333.411.941,04,-.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan

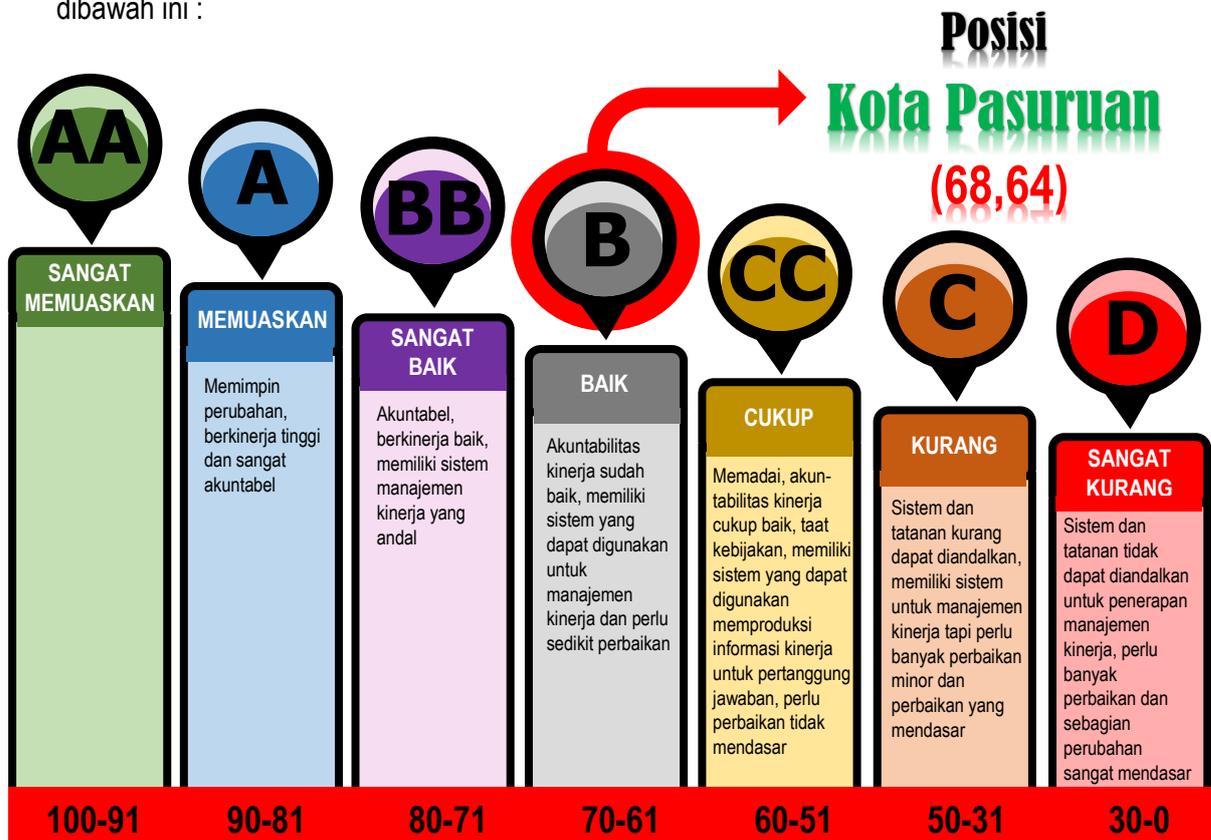
Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan, diambil dari RPJMD Kota Pasuruan tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*Performance improvement*). Pemerintah Kota Pasuruan melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala. Pada tahun 2018, dalam menetapkan target kinerja dilakukan secara tahunan dan diukur pencapaiannya setiap trubulan. Dalam membantu mempermudah setiap instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, telah dibangun sebuah sistem informasi akuntabilitas kinerja (SiAkur). Sistem Informasi ini membantu mempermudah sinkronisasi mulai proses perencanaan, perjanjian, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota serta Instansi-instansinya. Untuk SiAkur ini bisa diakses pada <http://siakur.pasuruankota.go.id/> dengan tampilan seperti gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja (SiAkur) Kota Pasuruan

Nilai hasil akhir evaluasi LKJIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada skema dibawah ini :



Gambar 3.2 Tingkatan Hasil Evaluasi SAKIP



Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Pasuruan dibagi menjadi 2 (dua) fokus pembahasan, yaitu : pembahasan pencapaian IKU dan pembahasan pencapaian indikator tambahan. Untuk pengukuran dan analisis hasil capaian IKU dan indikator kinerja tambahannya bisa dilihat pada tabel dan uraian dibawah ini :

3.1.1. Analisis Capaian IKU Pemerintah Kota Pasuruan

Tabel 3.1 Tabel Pengukuran Capaian IKU

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,72	0,68	0,68	0,67	98
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	81,79	79,04	71,11	72,24	91
Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,71	5,87	5,60	4,55	129
Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa	Pertumbuhan Ekonomi	6,07	5,47	5,46	5,47	100
Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	7,37	7,45	7,53	7,49	110
	Indeks Gini	0,47	0,38	0,32	0,39	100
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,12	66,00	65,67	67,28	102
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	77	60	50	64	107
Meningkatkan kerukunan masyarakat	Indeks Demokrasi	67,12	64,12	-	62,76	97
RATA-RATA CAPAIAN						104

Sumber Data ?

Dari tabel pengukuran kinerja capaian IKU Pemerintah Kota diatas, dapat dilihat capaian dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pasuruan, antara lain :

1. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan dibidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa. Indeks pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari data angka melek huruf (*literacy rate*) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata lama sekolah (*means-years of schooling*) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh



penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah.

Dibanding dua komponen pembentuk IPM yang lain yaitu indeks Kesehatan dan indeks Daya Beli, pencapaian indeks Pendidikan di Kota Pasuruan selama ini relatif paling besar. Kondisi ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak pembangunan dibidang lainnya.

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian indeks pendidikan yang pada tahun 2017 mencapai 0,68 dan pada tahun 2018 sebesar 0,67 atau menurun sebesar 0,01. Hal ini dikarenakan adanya alih urusan Pendidikan SMA yang dialihkan kewenangannya ke Pemerintah Propinsi, sehingga indikator pengukurannya juga berubah dan kelihatan menurun banyak. Pencapaian Indeks Pendidikan ditunjang oleh keberhasilan dengan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Pendidikan Masyarakat
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
4. Program Pendidikan Menengah
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun perbandingan capaian Indeks Pendidikan Kota Pasuruan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Perbandingan Indeks Pendidikan Propinsi Jatim dengan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2013	77,06	84,91
2014	77,83	85,01
2015	0,60*	0,67*
2016	0,60*	0,67*
2017	0,60*	0,68*
2018	0,61*	0,67*

*Perhitungan dengan metode baru

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pendidikan Kota Pasuruan masih berada diatas capaian Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Tingginya minat serta daya tarik masyarakat untuk bersekolah di Kota Pasuruan
- Meningkatnya tingkat partisipasi dan angka kelulusan tingkat pendidikan dasar
- Mudah nya para peserta didik untuk mengakses sarana Pendidikan
- Meningkatnya kesadaran orang tua untuk mensekolahkan anaknya

Hambatan/Masalah :

- Peningkatan kesejahteraan pendidik belum diikuti dengan kualitas pendidik
- Kesenjangan pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Perlu adanya pelatihan dan pengembangan keterampilan teknik mengajar pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidik yang terampil
- Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dan Kemenag terkait fasilitasi dan pembinaan pendidikan diniyah salafiya

Agenda Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan, antara lain:





2. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan alat ukur tingkat kesehatan masyarakat pada sebuah daerah. Untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat dibutuhkan suatu ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Dalam pengukuran indeks kesehatan, dibutuhkan epidemiologi penghitungan, antara lain :

1. Indeks Fertilitas
2. Indeks Morbiditas
3. Indeks Mortabilitas

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian indeks kesehatan yang pada tahun 2017 mencapai 71,11% meningkat pada tahun 2018 sebesar 72,24% atau meningkat sebesar 1,13%. Keberhasilan ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

1. Program Kesehatan masyarakat
2. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Adapun perbandingan capaian Indeks Kesehatan Kota Pasuruan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Perbandingan Indeks Kesehatan Propinsi Jatim dengan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2013	75.62	69.58
2014	75.90	69.85
2015	75.90*	70.04
2016	75.90*	70.91
2017	75.90*	71.11
2018	75,90*	72,24

* Data terakhir dari BPS

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kesehatan Kota Pasuruan masih berada dibawah capaian Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Meningkatnya masyarakat yang *care* terhadap kesehatannya
- Meningkatnya kualitas pada beberapa sarana kesehatan milik pemerintah
- Banyaknya program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin

Hambatan/Masalah :

- Tingginya stigma negatif terhadap pemeriksaan penyakit rawan (HIV), sehingga masih banyak sasaran yang tidak mau mengikuti pemeriksaan KT HIV
- Masih sedikitnya kelurahan yang ODF (open defecation free) di Kota Pasuruan

- Masih kurang sadarnya masyarakat mengenai rumah tangga dengan jamban sehat
- Belum terpenuhinya SDM Kesehatan yaitu sanitarian di Puskesmas

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Membuat program jemput bola untuk pemeriksaan penderita penyakit beresiko
- Memperbanyak kelurahan yang ODF
- Memperbanyak sosialisasi mengenai rumah tangga dengan jamban sehat
- Menambah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada masyarakat

Agenda Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan, antara lain:





3. *Tingkat Pengangguran Terbuka*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat penganggur terbuka terdiri dari empat komponen, yaitu :

1. Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2017 mencapai 5,60 meningkat pada tahun 2018 sebesar 4,55 atau meningkat sebesar 1,05. Keberhasilan ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

1. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
3. Program Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi
4. Program Pemberdayaan Usaha Mikro

Adapun perbandingan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Propinsi Jatim dengan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2013	4,30	5,41
2014	4,19	6,09
2015	4,40	5,57
2016	4,14	6,35
2017	4,00	4,64
2018	3,99	4,55

Data dari BPS

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan masih berada dibawah capaian Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Semakin banyaknya angkatan kerja yang mengikuti event job fair yang telah diadakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan

- Semakin banyak perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti acara job fair di Kota Pasuruan
- Banyaknya IKM baru yang tumbuh di periode tahun 2018

Hambatan/Masalah :

- Banyaknya angkatan kerja baru yang belum mendapatkan pekerjaan
- Masih banyak angkatan kerja yang pilih-pilih lowongan pekerjaan

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Memperbanyak event-event job fair guna menyerap tenaga kerja yang masih mencari lowongan pekerjaan
- Melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak
- Mengadakan pelatihan-pelatihan kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan

Agenda Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka, antara lain:





4. *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan Ekonomi adalah sebuah kondisi dimana meningkatnya pendapatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan pendapatan tersebut tidak dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dan dapat kita lihat dari output yang meningkat, perkembangan teknologi, dan berbagai inovasi di bidang sosial.

Pertumbuhan Ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan perekonomian negara dalam jangka waktu tertentu untuk menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan melalui kenaikan pendapatan nasional.

Kota Pasuruan dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang pada tahun 2017 mencapai 5,46 meningkat pada tahun 2018 sebesar 5,47 atau meningkat sebesar 0,01. Keberhasilan ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

1. Program Pemberdayaan UMKM
2. Program Peningkatan kualitas perdagangan
3. Program Penataan PKL
4. Program Peningkatan kualitas pelayanan pasar
5. Program Peningkatan IKM

Adapun perbandingan capaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jatim dengan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2014	5.86	5.70
2015	5.53	5.44
2016	5.55	5.46
2017	5.60	5.46
2018	5.66	5.47

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan masih berada dibawah capaian Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Adanya perbaikan sarana-sarana pendukung UMKM
- Peningkatan perlindungan konsumen
- Tertibnya PKL karena pembinaan yang terus menerus dilakukan
- Meningkatnya nilai produksi IKM karena metode promosi yang dilakukan tepat sasaran

Hambatan/Masalah :

- Masih terbatasnya kemampuan daerah dalam peningkatan PAD;
- Diperlukan revitalisasi sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa;
- Rendahnya nilai investasi untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif;
- Belum optimalnya pemanfaatan sektor perikanan dan kelautan di beberapa wilayah potensial yang menjadi sektor unggulan;
- Kurangnya kreatifitas, inovasi dan etos kerja bidang perekonomian

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Menambah sumber-sumber pendapatan baru untuk menambah PAD
- Menambah jumlah dan kualitas sarana perdagangan, industri dan jasa
- Menciptakan inovasi-inovasi baru guna menarik investor untuk menanamkan modalnya
- Mengoptimalkan pemanfaatan sektor perikanan dan kelautan
- Menambah pelatihan dan peningkatan SDM bidang perekonomian

Agenda Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, antara lain:





5. *Tingkat Kemiskinan*

Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian tingkat kemiskinan yang pada tahun 2017 mencapai 7,53 meningkat pada tahun 2018 sebesar 6,77 atau meningkat sebesar 0,76. Keberhasilan ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

1. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin

Adapun perbandingan capaian tingkat kemiskinan Kota Pasuruan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Perbandingan tingkat kemiskinan Propinsi Jatim dengan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2013	12.73	7.57
2014	12.28	7.34
2015	12.34	7.47
2016	12.05	7.62
2017	11.77	7.53
2018	10.98	7,49

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian tingkat kemiskinan Kota Pasuruan masih berada diatas capaian Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Adanya program jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin
- Adanya program sekolah gratis bagi anak keluarga miskin
- Banyak kegiatan yang bersifat pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu untuk bisa hidup mandiri
- Banyak kegiatan pemberian santunan maupun bantuan guna memperkecil pengeluaran bagi masyarakat miskin

Hambatan/Masalah :

- Data penduduk miskin yang belum terintegrasi
- Kurangnya koodinasi antar dinas terkait usaha penurunan kemiskinan sehingga bantuan kurang tepat sasaran

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Mengintegrasikan semua data masyarakat miskin melalui “single database” yang memadukan beberapa data penduduk miskin dengan data kependudukan.
- Memperbanyak kegiatan yang bersifat pemberdayaan sehingga warga miskin bisa mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri

Agenda Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan tingkat kemiskinan, antara lain:





6. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian Indeks Gini yang pada tahun 2017 mencapai 0,32 meningkat pada tahun 2018 sebesar 0,39 atau meningkat sebesar 0,07. Keberhasilan ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

1. Program Pemberdayaan Usaha Mikro
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pemberdayaan Masyarakat

Adapun perbandingan capaian Indeks Gini Kota Pasuruan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Perbandingan Indeks Gini Propinsi Jatim dengan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2014	0.37	0.31
2015	0.42	0.39
2016	0.42*	0.32
2017	0.42*	0.38
2018	0.42*	0,39

* Data terakhir dari BPS

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian Indeks Gini Kota Pasuruan masih berada diatas capaian Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Berkembangnya sektor-sektor niaga yang bisa menyerap tenaga kerja dan bisa menambah pendapatan masyarakat
- Relatif kondusifnya kondisi ekonomi sehingga konflik sosial bisa ditekan

Hambatan/Masalah :

- Pembangunan yang belum merata, khususnya daerah pesisir.
- Kultur masyarakat yang memandang pendidikan itu tidak penting, sehingga banyak anak usia sekolah yang membantu mencari nafkah orang tuanya.

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Pembangunan yang merata diseluruh wilayah Kota, pembangunan jalan lingkar utara (daerah pesisir)
- Mengaktifkan forum komunikasi masyarakat dengan pemerintah

Agenda Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan Indeks Gini, antara lain:





7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah :

1. Indeks Kualitas / Pencemaran Air
2. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara
3. Indeks Tutupan Hutan / Lahan

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian IKLH yang pada tahun 2017 mencapai 65,67 meningkat pada tahun 2018 sebesar 67,28 atau meningkat sebesar 1,61. Keberhasilan ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

1. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan
2. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
3. Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan
4. Program Pembinaan lingkungan sosial

Adapun perbandingan capaian IKLH Kota Pasuruan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Perbandingan IKLH Propinsi Jatim dengan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2015	56.25	47.58
2016	66.81	60.25
2017	66.29	66.08
2018	66.81*	67,28

Data DLHKP *Data terakhir DLHKP Propinsi

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian IKLH Kota Pasuruan masih berada diatas capaian Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibangun, sebagian besar adalah taman-taman yang bisa juga sebagai tempat rekreasi gratis bagi masyarakat Kota.
- Penerapan sekolah adi wiyata pada semua sekolah di wilayah Kota
- Dibentuknya Satgas Kebersihan yang bertugas menjaga dan meningkatkan kebersihan pada titik-titik Kota yang kotor
- Adanya pengelolaan sampah secara terpadu

Hambatan/Masalah :

- Belum optimalnya pengelolaan sampah secara terpadu
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan sungai
- Terbatasnya tenaga SDM sehingga belum menyentuh seluruh cakupan daerah pelayanannya

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Pengawasan dan pemantauan kandungan air sungai dan udara guna mengetahui kualitas air dan udara di kawasan Kota secara berkala
- Pelaksanaan Car Free Day secara rutin yang bisa mengurangi beban polusi Kota
- Pelaksanaan penanaman 1 juta pohon guna memperbanyak ruang terbuka hijau di wilayah Kota
- Penerapan *eco office* di wilayah Kota melalui kebijakan Walikota

Agenda Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan IKLH, antara lain:



8. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu cara untuk mengukur tingkat keefektifan dan keefisienan yaitu dengan menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi.

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2017 mencapai 50 meningkat pada tahun 2018 sebesar 64 atau meningkat sebesar 14. Keberhasilan ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Program Penataan Perundang-Undangan
3. Program Penataan ASN
4. Program Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Adapun perbandingan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Propinsi Jatim dengan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2015	76	40
2016	80	50
2017	81	64
2018	81*	64*

*Proyeksi angka terakhir

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan masih berada diatas capaian Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Banyak Perangkat Daerah yang sudah memahami alur SAKIP, sehingga bisa meningkatkan kinerjanya
- Telah ditandatangani Pakta Integritas Perangkat Daerah
- Tingkat Maturitas SPIP berada dilevel 2

- Opini BPK atas LKD 2016 Kota Pasuruan telah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- Hasil Evaluasi SAKIP Kota Pasuruan mendapatkan nilai B

Hambatan/Masalah :

- Masih ada beberapa UPP yang tidak menjalankan prosedur sesuai SOPnya
- Masih ada beberapa Perangkat Daerah yang berbicara Output pada target kerjanya, karena terbentur pada dasar perencanaan (RPJMD) yang belum disahkan perubahannya

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Penerapan si-Akur guna menyingkronkan dan memperjelas kinerja Perangkat Daerah
- Penerapan si-Jaja guna memperjelas target dan realisasi kinerja setiap ASN
- Integrasi database kinerja, mulai dari sektor perencanaan sampai sektor keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja
- *Refocusing* program pada perencanaan tahun selanjutnya, sehingga arah pembangunan akan lebih terfokus di tiap tahunnya
- Menyegerakan pengesahan Perubahan RPJMD untuk menjadi dasar pembuatan RENSTRA Perangkat Daerah

Agenda Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain:



9. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu : kebebasan sipil, hak-hak politik dan Lembaga demokrasi. Klasifikasi indeks demokrasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Baik (indeks > 80)
2. Sedang (60-80)
3. Buruk (indeks < 60)

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia yang pada tahun 2018 mencapai 67,76. Keberhasilan ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

1. Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik Dan Pendidikan Politik Masyarakat
2. Program Penguatan Ketahanan Bangsa
3. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
4. Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Adapun perbandingan capaian Indeks Demokrasi Indonesia Kota Pasuruan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia Propinsi Jatim dengan Kota Pasuruan

Tahun	Prov. Jatim	Kota Pasuruan
2017	70,92	-
2018	70,92	62,76

Data BPS

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian Indeks Demokrasi Kota Pasuruan masih berada diatas capaian Propinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Kondisi perpolitikan yang kondusif
- Kebebasan untuk menyampaikan pendapat politiknya
- Aktifnya partai politik diparlemen

Hambatan/Masalah :

- Sering terjadinya persengketaan dan akses politik
- Rawannya gesekan Lembaga/partai politik
- Masih rawan politik praktis

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Melaksanakan pembinaan kader-kader parpol
- Komunikasi dan koordinasi antar parpol
- Meminimalisir dan melakukan pengawasan terkait aktivitas politik

Agenda Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia, antara lain:





3.1.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Pasuruan

Tabel 3.2 Tabel Pengukuran Capaian Indikator Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Angka Partisipasi Kasar PAUD	84.56	82,8	80,03	99,40	120,4
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	100	100	94,84	113,65	113,7
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	89.32	83,43	83,57	120,48	144,4
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	12.00	10,6	9,10	9,16	86,4
	Harapan Lama Sekolah	13.67	13,61	13,58	13,59	99,8
	Nilai Rata-rata Ujian Jenjang Pendidikan SD	80	70	-	76,5	109
	Nilai Rata-rata Ujian Jenjang Pendidikan SMP	80	70	-	75	107
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.25	71,27	70,87	71,02	99,6
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67.78	67,43	67,14	66,33	98,4
Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa	Persentase peningkatan nilai produksi sektor industri	12.09%	11,45%	-	22,07%	200
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor perdagangan	1.78%	11,28%	-	28,72%	254
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor jasa	3.58%	13,17%	-	20,84%	153
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor pertanian dan perikanan	9.49%	9,12%	-	9,45%	103
Menurunnya kemiskinan	Indeks kedalaman kemiskinan	0.20	1,00	0,58	0,90	90
	Indeks keparahan kemiskinan	1.21	0,15	0,09	0,19	127



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana perekonomian dan sosial	Persentase jalan dan sarana pendukungnya dalam kondisi mantap	-	54,48	-	60,5	111
	Cakupan layanan air bersih	100	94,87	-	84,94	90
	Persentase Kawasan Kumuh	0	5,23%	-	7,32	71
	Cakupan layanan sanitasi	100	94,45	-	87,94	92
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Ruang Terbuka Hijau	24,22	23,47%	16,57%	26,74%	114
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Predikat SAKIP Kota	A	BB	B	B	80
	Tingkat kematangan SPIP	Terkelola dan Terukur	Berkembang	Berkembang	Berkembang	100
	Opini BPK atas LKD	WTP	WTP	WTP	WTP	100
Menurunnya ketergantungan keuangan daerah	Rasio ketergantungan keuangan daerah	82,80	84,22	83,36	82,85	102
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,32	82,23	75,77	79,4	97
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase potensi konflik ipoleksosbud yang ditangani	0%	10%	-	0%	100
Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	69.17%	63,78%	-	78,26%	123
	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	13.24%	12,47%	-	31%	248
RATA-RATA CAPAIAN						119

Untuk lebih detailnya, analisis capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Pasuruan akan dijabarkan pencapaiannya per sasaran, sebagai berikut:



1. Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan”

Tabel 3.3 Tabel Pengukuran Capaian Indikator Tambahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Angka Partisipasi Kasar PAUD	84.56	82,8	80,03	99,40	120,4
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	100	100	94,84	113,65	113,7
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	89.32	83,43	83,57	120,48	144,4
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	12.00	10,6	9,10	9,16	86,4
	Harapan Lama Sekolah	13.67	13,61	13,58	13,59	99,8
	Nilai Rata-rata Ujian Jenjang Pendidikan SD	80	70	-	76,5	109
	Nilai Rata-rata Ujian Jenjang Pendidikan SMP	80	70	-	75	107
	RATA-RATA CAPAIAN					

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari tabel pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota diatas, dapat dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

Faktor Keberhasilan

- Meratanya sarana Pendidikan yang berkualitas, karena kebijakan zona bagi siswa sekolah
- Semakin banyaknya sekolah yang berprestasi, karena kualitas sarana Pendidikan sudah semakin merata

Faktor Hambatan

- Terbatasnya jumlah tenaga pendidik pada pendidikan dengan berkebutuhan khusus
- Masih kurangnya minat orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus untuk menyekolahkanannya
- Belum validnya database anak berkebutuhan khusus di Kota Pasuruan

Upaya Pemecahan Masalah

- Menambah tenaga pendidik dengan keterampilan khusus untuk mengajar di sekolah inklusif
- Menyediakan kendaraan antar jemput untuk peserta didik berkebutuhan khusus
- Melakukan pendataan secara berkelanjutan terhadap anak berkebutuhan khusus usia sekolah



2. Sasaran 2 “Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat”

Tabel 3.4 Tabel Pengukuran Capaian Indikator Tambahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.25	71,27	70,87	71,02	99,6
RATA-RATA CAPAIAN						99,6

Data Dinas Kesehatan

Dari tabel pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota diatas, dapat dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

Faktor Keberhasilan

- Pencapaian SPM yang melebihi target yang telah ditetapkan
- Meningkatnya keluarga/rumah tangga yang dilayani air bersih
- Meningkatnya kader PHBS dan Kelurahan Siaga yang aktif

Faktor Hambatan

- Kurangnya kesediaan dan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi kader Posyandu
- Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan sarana kesehatan terutama pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
- masih adanya beberapa masyarakat yang menolak anaknya mendapatkan imunisasi difteri karena takut akan akibat pasca imunisasi misalnya panas

Upaya Pemecahan Masalah

- Perlu adanya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, TOMA, TOGA untuk mendukung program-program kesehatan
- Penambahan Sumber Daya Manusia di Bidang kesehatan (misalnya dengan pengangkatan tenaga kontrak, tenaga harian lepas)
- Pemberian pelatihan dan penghargaan untuk kader posyandu (misalnya: peningkatan insentif kader, pemberian seragam kader, atau piagam untuk kader)
- Perbaikan kualitas layanan Rumah Sakit Umum Daerah
- Memperbanyak sosialisasi mengenai bahaya ORI Difteri



3. Sasaran 3 “Meningkatnya kesempatan kerja”

Tabel 3.5 Tabel Pengukuran Capaian Indikator Tambahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,78	67,43	67,14	66,33	98,4
RATA-RATA CAPAIAN						98,4

Data Dinas Tenaga Kerja

Dari tabel pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota diatas, dapat dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

Faktor Keberhasilan

- Meningkatnya jumlah angkatan kerja baru
- Antusiasme dari pencari kerja untuk mengikuti pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan

Faktor Hambatan

- Masih banyak lowongan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan
- Ada sebagian pencari kerja yang pilih-pilih pekerjaan sehingga tidak semua angkatan kerja dapat diberikan pelatihan
- Pencari kerja yang mau keluar daerah/pulau masih kecil

Upaya Pemecahan Masalah

- Memperbanyak event job fair guna menyerap tenaga kerja
- Memperkuat koordinasi dengan perusahaan penyedia lowongan kerja untuk memastikan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan
- Meningkatkan penerapan Bursa Kerja Online
- Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja



4. Sasaran 4 “Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa”

Tabel 3.6 Tabel Pengukuran Capaian Indikator Tambahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa	Persentase peningkatan nilai produksi sektor industri	12.09%	11,45%	-	22,07%	200
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor perdagangan	1.78%	11,28%	-	28,72%	254
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor jasa	3.58%	13,17%	-	20,84%	153
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor pertanian dan perikanan	9.49%	9,12%	-	9.45%	103
RATA-RATA CAPAIAN						177,5

Data Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan

Dari tabel pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota diatas, dapat dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

Faktor Keberhasilan

- Jumlah produksi perikanan budidaya yang mulai meningkat
- Kelompok-kelompok petani perikanan (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR) sudah mulai bisa mandiri
- Menurunnya tingkat keluhan konsumen
- PKL sudah mulai tertib
- Banyak produk industri yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi produk

Faktor Hambatan

- Terbatasnya Ketersediaan Bahan Baku
- Terbatasnya Jaringan Pemasaran
- Kurangnya Akses Permodalan
- Masih kurangnya kemandirian dari IKM Kota Pasuruan dalam mengikuti even pameran, dikarenakan ketergantungan pelaku usaha terhadap fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah
- Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya;
- Semakin berkurangnya luasan tambak dan diperparah dengan semakin menurunnya kualitas tambak;
- Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan nelayan dan keluarganya;
- Keterbatasan teknologi pengolahan dan pasca panen

Upaya Pemecahan Masalah

- Perlunya upaya menjembatani kerjasama pemenuhan bahan baku dengan daerah penghasil bahan baku.
- Perlu dilakukan fasilitasi promosi dan pemasaran dan promosi produk melalui pameran - pameran skala daerah, nasional maupun internasional.
- Meningkatkan akses IKM terhadap sumber pembiayaan (Modal) dengan memfasilitasi dan menjembatani antara IKM dengan CSR Perusahaan.
- Diberikan pelatihan mengenai teknik pemasaran produk baik melalui online maupun offline kepada pelaku usaha Kota Pasuruan
- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya
- Peningkatan kualitas lahan tambak
- Peningkatan sumberdaya manusia nelayan dan pembudidaya perikanan
- Peningkatan sarana dan prasarana pasca panen hasil perikanan
- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keluarga nelayan dan pembudidaya perikanan.

5. Sasaran 5 “Menurunnya kemiskinan”

Tabel 3.7 Tabel Pengukuran Capaian Indikator Tambahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Menurunnya kemiskinan	Indeks kedalaman kemiskinan	0.20	1,00	0,58	0,90	90
	Indeks keparahan kemiskinan	1.21	0,15	0,09	0,19	127
RATA-RATA CAPAIAN						108,5

Data Dinas Sosial, Bapelitbangda

Dari tabel pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota diatas, dapat dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

Faktor Keberhasilan

- Bertambahnya program-program penanganan fakir miskin
- Adanya program-program sosial penanggulangan kemiskinan

Faktor Hambatan

- Masih kurang layaknya bantuan sosial kepada lanjut usia terlantar
- Sarana dan prasarana pelayanan sosial yang belum optimal
- Belum sinerginya data PMKS yang ada dimasing masing bidang.
- Pelayanan Santunan Kematian masih dirasa kurang maksimal, karena masih banyaknya aturan yang harus dipenuhi;



- Pelayanan Penyaluran bantuan PKH, masih dirasa kurang tepat sasaran, sehingga perlu ditingkatkan ;
- Pelayanan Tanggap darurat masih kurang mencukupi, dan tidak bisa menjangkau sampai ke plosok.
- Masih terbatasnya SDM dalam rangka up date data kemiskinan sebagai sasaran masyarakat miskin yang akan dilayani.
- Belum sinerginya koordinasi dan kerja sama OPD yang terkait dalam penanganan masyarakat miskin atau PMKS.
- Belum optimalnya penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja sosial masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat miskin/PMKS baik berupa tali asih, sarana prasarana dan peningkatan kapasitas kemampuannya

Upaya Pemecahan Masalah

- Perlu adanya peningkatan jumlah bantuan sosial kepada lansia terlantar sehingga mendekati kehidupan yang layak.
- Mengoptimalkan sarana mobil UPSK secara berkala untuk mendekatkan akses kepada masyarakat dan supaya permasalahan sosial dimasyarakat cepat terlayani.
- Meningkatkan koordinasi tingkat bidang terkait sasaran garapan pelayanan terhadap PMKS sehingga meminimalkan data tumpang tindih dan memaksimalkan pelayanan kepada PMKS.
- Melakukan perubahan Perwali tentang Santunan kematian yang sekarang lagi proses penyelesaian;
- Perlu dilakukan up date data dan selalu berkoordinasi lintas sektoral;
- Mengupayakan pemenuhan kebutuhan dengan melakukan pemetaan dan pembagian kelompok.
- Peningkatan jumlah SDM baik jumlah atau kemampuannya dalam rangka up date data kemiskinan sebagai sasaran masyarakat miskin yang akan dilayani.
- Ditingkatkannya koordinasi dan kerja sama OPD yang terkait dalam penanganan masyarakat miskin atau PMKS.
- Memberikan penghargaan dari pemerintah kepada pekerja sosial masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat miskin/PMKS baik berupa tali asih, pemenuhan sarana prasarana dan pelatihan peningkatan kapasitas pelayanan sosialnya



6. Sasaran 6 “Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana perekonomian dan sosial”

Tabel 3.8 Tabel Pengukuran Capaian Indikator Tambahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana perekonomian dan sosial	Persentase jalan dan sarana pendukungnya dalam kondisi mantap	-	54,48	-	60,5	111
	Cakupan layanan air bersih	100	94,87	-	84,94	90
	Persentase Kawasan Kumuh	0	5,23%	-	7,32	71
	Cakupan layanan sanitasi	100	94,45	-	87,94	92
RATA-RATA CAPAIAN						91

Data Dinas PUPR, Dinas Perkim

Dari tabel pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota diatas, dapat dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

Faktor Keberhasilan

- Meningkatnya penganggaran terkait perbaikan infrastruktur umum
- Berkurangnya timbunan sampah, karena mulai berfungsinya program bank sampah
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pelestarian lingkungan

Faktor Hambatan

- Pertambahan kapasitas jalan, utamanya jalan kota dan jalang lingkungan, yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor
- Masih kurangnya kualitas jalan
- Masih belum tercatat asset tanah bawah jalan dan PSU perumahan.
- Pelaksanaan pembangunan konstruksi, waktu menentukan perencanaan lokasi berdasarkan usulan/persetujuan yang akan dibangun tetapi pada saat pelaksanaan warga menolak lokasi tersebut sehingga ada perubahan lokasi yang berakibat pada molornya jangka waktu pelaksanaan.
- Kurangnya kesadaran pengembang perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang sesuai standar.
- Masih banyaknya adanya pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU-nya kepada Pemerintah Kota sehingga PSU nya tidak terpelihara dengan baik.
- Masih banyaknya kebutuhan akan hunian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.



- Pertumbuhan penyediaan tanah untuk makam (TPU) yang tidak sebanding dengan angka kematian penduduk dan masih banyaknya makam di wilayah kelurahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Upaya Pemecahan Masalah

- Melakukan perencanaan penambahan kapasitas akses jalan baru.
- Melakukan pemeliharaan dan peningkatan jalan
- Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah aset.
- Untuk usulan lokasi pembangunan dibuat surat pernyataan (Berita Acara) dari warga sehingga tidak ada perubahan lokasi lagi.
- Melaksanakan sosialisasi kepada pengembang perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang sesuai standar.
- Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait bersama pengembang perumahan agar segera menyerahkan PSU-nya kepada Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemerintah Kota Pasuruan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengajukan usulan rusunawa, BSPS ataupun RTLH demi peningkatan ketersediaan rumah layak huni.
- Melakukan pengembangan/perluasan TPU serta melaksanakan koordinasi dengan lurah dan masyarakat agar makam di wilayah kelurahannya untuk dapat diserahkan ke Pemerintah Kota untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

7. Sasaran 7 “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”

Tabel 3.9 Tabel Pengukuran Capaian Indikator Tambahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Ruang Terbuka Hijau	24,22	23,47%	16,57%	26,74%	114
RATA-RATA CAPAIAN						114

Data Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan

Dari tabel pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota diatas, dapat dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

Faktor Keberhasilan

- Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau
- Meningkatnya anggaran perbaikan infrastruktur umum

**Faktor Hambatan**

- Belum optimalnya pemeliharaan saluran air dan penyediaan resapan air hujan, sebagai bagian mitigasi banjir.
- Belum optimalnya penanganan genangan banjir.
- Tingginya laju alih fungsi lahan pada sawah/irigasi teknis

Upaya Pemecahan Masalah

- Melaksanakan pemeliharaan dan normalisasi terhadap saluran air dan penyediaan resapan air hujan secara berkala.
- Menambah area resapan air dalam jumlah besar, seperti embung.
- Meningkatkan fungsi pengendalian lahan terhadap pemanfaatan ruang

8. Sasaran 8 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah”

Tabel 3.10 Tabel Pengukuran Capaian Indikator Tambahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Predikat SAKIP Kota	A	BB	B	B	100
	Tingkat kematangan SPIP	Terkelola dan Terukur	Berkembang	Berkembang	Berkembang	100
	Opini BPK atas LKD	WTP	WTP	WTP	WTP	100
RATA-RATA CAPAIAN						100

Data Setda, Inspektorat, BPKA

Dari tabel pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota diatas, dapat dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

Faktor Keberhasilan

- Koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan, perencanaan sampai evaluasi kinerja daerah;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja melalui pengembangan inovasi berbasis Teknologi Informasi (si-Akur, si-Jaja, si-Upin, dll);
- Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

Faktor Hambatan

- Masih banyak ASN yang kurang *care* terhadap kemajuan teknologi yang memicu peningkatan kinerja
- Belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan asli daerah.
- Keterbatasan SDM penanganan pajak dan retribusi daerah.
- Minimnya penggalian potensi baru baik pajak maupun retribusi daerah.



- Belum tercatatnya data aset BMD secara sistematis menurut ketentuan Permendagri Nomor 16 tahun 2016;
- Lemahnya koordinasi penghapusan aset

Upaya Pemecahan Masalah

- Melakukan pelatihan-pelatihan khusus guna membantu meningkatkan kapasitas SDM aparatur
- Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM penanganan pajak dan retribusi daerah.
- Melakukan explorasi potensi baru pajak dan retribusi daerah.
- Melakukan pencatatan data aset BMD secara sistematis sesuai Permendagri Nomor 16 tahun 2016.
- Mengintensifkan koordinasi terkait dengan penghapusan aset

9. Sasaran 9 “Menurunnya ketergantungan keuangan daerah”

Tabel 3.11 Tabel Pengukuran Capaian Indikator Tambahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Menurunnya ketergantungan keuangan daerah	Rasio ketergantungan keuangan daerah	82,80	84,22	83,36	82,85	102
RATA-RATA CAPAIAN						102

Data Pendapatan Daerah, BPKA

Dari tabel pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota diatas, dapat dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

Faktor Keberhasilan

- Banyak WP baru yang sadar betapa pentingnya membayar pajak
- Meningkatnya pendapatan dari obyek pajak lain

Faktor Hambatan

- Masih banyaknya Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu
- Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dibandingkan kebutuhan fiskal berupa usulan program/kegiatan PD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
- Masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak

Upaya Pemecahan Masalah

- Melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang masih menyampaikan tidak tepat waktu
- Mengarahkan PD untuk bisa mengusulkan Program/Kegiatan yang bersifat prioritas
- Melaksanakan analisa dan pembaruan terhadap metode pengumpulan dan pengolahan data WPD dan Obyek Pajak sehingga data yang tersedia menjadi lebih valid dan selalu update

**10. Sasaran 10 “Indeks Kepuasan Masyarakat”**

Tabel 3.12 Tabel Pengukuran Capaian Indikator Tambahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,32	82,23	75,77	79,4	97
RATA-RATA CAPAIAN						97

Data Setda

Dari tabel pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota diatas, dapat dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

Faktor Keberhasilan

- Koordinasi yang baik antar UPP
- Adanya lomba penilaian inovasi UPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan

Faktor Hambatan

- Masih adanya unit pelayanan publik yang belum memenuhi standar pelayanan publik sehingga capaian target indeks kepuasan masyarakat masih belum mencapai target.
- Masih adanya Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya menyusun SOP.
- Adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait urusan wajib pelayanan dasar, menimbulkan ketidak pastian Perangkat Daerah yang wajib melaporkan SPM.
- Masih rendahnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah.
- Masih rendahnya kualitas penerapan roadmap reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah

Upaya Pemecahan Masalah

- Perlunya pendampingan yang lebih intensif kepada unit pelayanan publik agar dapat memenuhi standar pelayanan publik.
- Perlunya pendampingan dan evaluasi kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur.
- Perlunya koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dasar penyusunan SPM, sekaligus pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan laporannya.
- Perlunya pendampingan kepada Perangkat Daerah khususnya dalam penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan.
- Perlunya peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pencapaian 8 goals reformasi birokrasi

**11. Sasaran 11 “Meningkatnya kerukunan masyarakat”**

Tabel 3.13 Tabel Pengukuran Capaian Indikator Tambahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase potensi konflik ipoleksosbud yang ditangani	0%	10%	-	0%	100
RATA-RATA CAPAIAN						100

Data Bakesbangpol

Dari tabel pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota diatas, dapat dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

Faktor Keberhasilan

- Semakin kecilnya konflik ipoleksosbud yang terjadi
- Penyelenggaraan pemilu Pilgub Jatim yang kondusif
- Semakin tingginya rasa toleransi dalam masyarakat

Faktor Hambatan

- Masih banyaknya masyarakat yang mementingkan kesukuannya
- Belum adanya SOP penanganan konflik ipoleksosbud
- Kurangnya wadah pembinaan untuk masyarakat

Upaya Pemecahan Masalah

- Memperbanyak forum-forum komunikasi antara tokoh masyarakat, pemerintah dan masyarakat guna mempersempit gesekan-gesekan/konflik dalam masyarakat
- Membuat SOP penanganan konflik
- Mendirikan wadah/menunjuk agen perubahan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bahayanya konflik ipoleksosbud

12. Sasaran 12 “Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat”

Tabel 3.14 Tabel Pengukuran Capaian Indikator Tambahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
		RPJMD	2018	2017	2018	
Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	69.17%	63,78%	-	78,26%	123
	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	13.24%	12,47%	-	31%	248
RATA-RATA CAPAIAN						185,5



Dari tabel pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota diatas, dapat dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

Faktor Keberhasilan

- Banyak even kesenian yang digelar pemerintah Kota Pasuruan
- Adanya regulasi terkait penetapan cagar budaya sehingga bisa dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk pelestariannya

Faktor Hambatan

- Menurunnya minat generasi muda untuk mempelajari budaya dan kesenian daerah
- Belum optimalnya upaya pelestarian artefak budaya, terutama yang berkaitan dengan sejarah Kota Pasuruan

Upaya Pemecahan Masalah

- Memperbanyak even-even kesenian dan budaya daerah sebagai upaya memperkenalkan budaya kepada generasi muda dengan dibalut dengan konsep modern/kekinian.
- Mengoptimalkan lagi upaya pelestarian artefak budaya di wilayah Kota Pasuruan dengan memperkuat dasar regulasi yang ada.



3.2 Akuntabilitas Keuangan

Penggunaan sumber daya yang ada diprioritaskan untuk pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan, namun demikian tetap memperhatikan efisiensi anggaran tanpa menurunkan kualitas capaian kinerja.

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 7 Tujuan dan 12 sasaran strategis dengan didukung 138 Program Pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 maka besaran alokasi dan realisasi belanja Pemerintah Kota Pasuruan sebesar:

Anggaran : Rp. 1.006.333.411.941,04

Realisasi : Rp. 809.437.611.037,98

Capaian : 80,43%

Capaian kinerja program dan kegiatan pada masing-masing urusan sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran. Total APBD Kota Pasuruan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.006.333.411.941,04 dapat terealisasi sebesar Rp. 809.437.611.037,98 atau 80,43% dengan rincian alokasi dan realisasi belanja tiap OPD sebagai berikut :

Tabel. 3.47. Tabel Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2018

No.	Perangkat Daerah	Belanja	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.614.309.170	46.753.030.076,39	2.861.279.094,61	94,23
2	Dinas Kesehatan	127.645.846.309,88	102.902.473.127	24.743.373.182,88	80,62
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101.594.012.500	91.687.261.250	9.906.751.250	90,25
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	32.516.480.100	29.361.750.452,55	3.154.729.647,45	90,30
5	Dinas Sosial	4.165.024.850	3.111.635.474	1.053.389.376	74,71
6	Dinas Tenaga Kerja	2.829.986.500	2.537.384.264	292.602.236	89,66
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB	6.237.943.700	5.190.176.760	1.047.766.940	83,20
8	Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan	33.497.090.100	30.093.065.691	3.404.024.409	89,84
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.276.319.600	3.650.380.530	625.939.070	85,36
10	Dinas Perhubungan	31.803.449.050	26.952.645.535	4.850.803.515	84,75
11	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	13.431.811.597	8.384.965.059	5.046.846.538	62,42
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.500.429.100	8.443.675.320	3.056.753.780	73,42
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.149.866.500	1.716.612.292	433.254.208	79,85
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.147.367.000	1.827.393.679	319.973.321	85,10
15	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8.000.585.910	6.178.608.479	1.821.977.431	77,22
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.529.277.650	3.401.262.148	128.015.502	96,37



No.	Perangkat Daerah	Belanja	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
17	Dinas Perikanan	16.759.969.000	1.900.283.286,04	14.859.685.713,96	11,34
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.012.119.300	3.522.630.996	489.488.304	87,80
19	Satuan Polisi Pamong Praja	5.093.561.850	2.504.740.130	2.588.821.720	49,17
20	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.104.814.300	3.399.745.592	705.068.708	82,82
21	Badan Kepegawaian Daerah	6.348.292.600	3.451.965.728	2.896.326.872	54,38
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	25.659.052.550	3.608.406.952	22.050.645.598	14,06
23	Badan Pendapatan Daerah	2.881.636.300	2.653.044.028	228.592.272	92,07
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.310.037.600	2.941.020.263	369.017.337	88,65
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.492.955.700	3.200.384.558	292.571.142	91,62
26	RSUD Dr. R. Soedarsono	87.356.731.252,63	74.098.452.970	13.258.278.282,63	84,82
27	Sekretariat DPRD	22.169.877.320,85	14.420.728.652	7.749.148.668,85	65,05
28	Inspektorat	2.340.231.950	1.839.494.493	500.737.457	78,60
29	Kecamatan Gadingrejo	3.991.660.900	3.583.893.421	407.767.479	89,78
30	Kecamatan Panggungrejo	5.897.653.650	5.321.184.379	576.469.271	90,23
31	Kecamatan Bugul Kidul	3.226.721.250	2.911.694.469	315.026.781	90,24
32	Kecamatan Purworejo	3.937.048.050	3.497.399.864	439.648.186	88,83
33	Sekretariat Daerah	22.964.170.650	18.048.852.226	4.915.318.424	78,60

Total Realisasi belanja yang mencapai 80,43% sampai dengan berakhirnya tahun anggaran menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran, namun hal tersebut tidak mempengaruhi pencapaian sasaran dan kinerja OPD, sebab sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya secara umum sasaran dan kinerja OPD menunjukkan capaian yang cukup baik.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pasuruan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

LKjIP Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2018 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Pasuruan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017. Ada 7 (tujuh) kinerja tujuan dengan 12 (duabelas) sasaran strategis yang diwujudkan untuk pencapaian misi Kota Pasuruan, gambaran rincian dari Perubahan RPJMD Tahun 2016-2121 Kota Pasuruan sebagai berikut:

VISI	
7 MISI	
7 TUJUAN	
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
34 SASARAN STRATEGIS	12 SASARAN STRATEGIS
102 INDIKATOR KINERJA	37 INDIKATOR KINERJA

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2018, masih terdapat beberapa IKU yang belum bisa memenuhi target, antara lain dilihat pada tabel dibawah:



Tabel 4.1 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Pasuruan

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian													
				Sangat Memuaskan		Memuaskan		Sangat Baik		Baik		Cukup		Kurang		Sangat Kurang	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
MISI 1																	
1.	Tujuan 1																
1.1	Sasaran 1	8		7		1											
MISI 2																	
2.	Tujuan 2																
2.1	Sasaran 2	2				2											
MISI 3																	
3.	Tujuan 3																
3.1	Sasaran 3	2		1		1											
MISI 4																	
4.	Tujuan 4																
4.1	Sasaran 4	5		5													
4.2	Sasaran 5	2		1		1											
MISI 5																	
5.	Tujuan 5																
5.1	Sasaran 6	4		1		2				1							
5.2	Sasaran 7	2		2													
MISI 6																	
6.	Tujuan 6																
6.1	Sasaran 8	4		3				1									
6.2	Sasaran 9	1		1													
6.3	Sasaran 10	1				1											
MISI 7																	
7.	Tujuan 7																
7.1	Sasaran 11	2		1		1											
7.2	Sasaran 12	2		2													



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

Capaian IKU

IKU yang belum bisa memenuhi target, antara lain :

1. Indeks Pendidikan
2. Indeks Kesehatan
3. Indeks Demokrasi A

IKU yang telah melampaui target, antara lain :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Tingkat Kemiskinan
4. Indeks Gini
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
6. Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Indikator Sasaran

Indikator Kinerja yang melampaui target, antara lain :

1. Angka Partisipasi Kasar PAUD
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B
4. Nilai Rata-rata Ujian Jenjang Pendidikan SD
5. Nilai Rata-rata Ujian Jenjang Pendidikan SMP
6. Persentase peningkatan nilai produksi sektor industri
7. Persentase peningkatan nilai produksi sektor perdagangan
8. Persentase peningkatan nilai produksi sektor jasa
9. Persentase peningkatan nilai produksi sektor pertanian dan perikanan
10. Indeks keparahan kemiskinan
11. Persentase jalan dan sarana pendukungnya dalam kondisi mantap
12. Persentase Ruang Terbuka Hijau
13. Tingkat kematangan SPIP
14. Opini BPK atas LKD
15. Rasio ketergantungan keuangan daerah
16. Persentase potensi konflik ipoleksosbud yang ditangani
17. Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif
18. Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan

Indikator Kinerja yang belum bisa melampaui target, antara lain :

1. Angka Rata-rata Lama Sekolah
2. Harapan Lama Sekolah
3. Angka Harapan Hidup (AHH)
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
5. Indeks kedalaman kemiskinan
6. Cakupan layanan air bersih
7. Persentase Kawasan Kumuh
8. Cakupan layanan sanitasi
9. Predikat SAKIP Kota
10. Indeks Kepuasan Masyarakat

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Melihat hasil pengukuran kinerja, maka sebagai bentuk rencana tindak lanjut terhadap indikator kinerja utama yang telah dilampaui, antara lain :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pasuruan tahun 2018 sebesar 5,34% angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian TPT di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kondisi TPT di Kota Pasuruan diperkirakan masih akan cukup rendah mengingat prospek perekonomian daerah yang masih kondusif.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Sektor perdagangan merupakan salah satu kontributor utama dalam pembentukan PDRB Kota Pasuruan, yang masih potensial untuk dikembangkan. Hal ini tidak lepas dari keberadaan 6 pasar tradisional di wilayah Kota Pasuruan. Rencana pengembangan pasar tradisional yang sudah ada, akan diarahkan pada peningkatan kelayakan sarana-prasarana perniagaan di dalam pasar. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kenyamanan pedagang dengan pembeli dalam bertransaksi di pasar tradisional

3. Tingkat Kemiskinan

Rencana Tindak Lanjut, rancangan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 dilakukan secara integral dengan melibatkan OPD terkait, Program Jalin Matra tidak hanya memberikan bantuan uang untuk modal usaha kepada rumah tangga miskin tetapi juga memberikan pelatihan-pelatihan pasca program agar rumah tangga miskin dapat mengembangkan usaha. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa OPD seperti



Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta beberapa Perguruan Tinggi

4. Indeks Gini

Pada tahun 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kota Pasuruan yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,39. Sebenarnya dengan meningkatnya gini ratio ini kelompok ekonomi rendah juga mengalami peningkatan pendapatan, namun peningkatannya masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan peningkatan pendapatan dari kelompok ekonomi menengah ke atas.

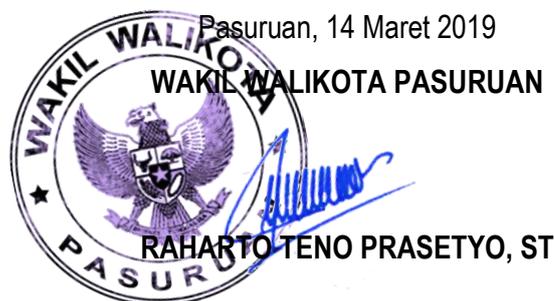
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perkembangan IKLH Pemerintah Kota Pasuruan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 semakin meningkat namun masih termasuk dalam kategori cukup, yaitu 67,28. Pada Tahun 2020, Pemerintah Kota Pasuruan harus terus meningkatkan pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kota Pasuruan dan mencapai target IKLH Kota Pasuruan Tahun 2020 sebesar 67,00-68,52 atau dengan kategori cukup

6. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi tahun 2018 meningkat menjadi 64. Peningkatan ini mencerminkan birokrasi pemerintah Kota Pasuruan semakin profesional dengan berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pasuruan, 14 Maret 2019



RAHARTO TENO PRASETYO, ST



LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PASURUAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PASURUAN**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHARTO TENO PRASETYO, ST
Jabatan : WAKIL WALIKOTA PASURUAN

berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pasuruan, 31 Oktober 2018
WAKIL WALIKOTA PASURUAN

RAHARTO TENO PRASETYO, ST



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	KET
1	2	3	4	
Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68	0,68	IKU
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	82,8	82,8	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	100	100	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	83,43	83,43	
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,6	10,6	
	Harapan Lama Sekolah	13,61	13,61	
	Nilai Rata-rata Ujian Jenjang Pendidikan SD	70	70	
	Nilai Rata-rata Ujian Jenjang Pendidikan SMP	70	70	
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	79,04	79,04	IKU
	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,27	71,27	
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,87	5,87	IKU
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,43	67,43	
Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa	Pertumbuhan Ekonomi	5,47	5,47	IKU
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor industri	11,45%	11,45%	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor perdagangan	11,28%	11,28%	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor jasa	13,17%	13,17%	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor pertanian dan perikanan	9,12%	9,12%	
Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	7,45	7,45	IKU
	Indeks kedalaman kemiskinan	1,31	1,00	
	Indeks keparahan kemiskinan	0,26	0,15	
	Indeks Gini	0,38	0,38	IKU



Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana perekonomian dan sosial	Persentase jalan dan sarana pendukungnya dalam kondisi mantap	54,48	54,48	
	Cakupan layanan air bersih	94,87	94,87	
	Persentase Kawasan Kumuh	5,23%	5,23%	
	Cakupan layanan sanitasi	94,45	94,45	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,67	66,00	IKU
	Persentase Ruang Terbuka Hijau	23,47%	23,47%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	50	60	IKU
	Predikat SAKIP Kota	A	BB	
	Tingkat kematangan SPIP	Berkembang	Berkembang	
	Opini BPK atas LKD	WTP	WTP	
Menurunnya ketergantungan keuangan daerah	Rasio ketergantungan keuangan daerah	84,22	84,22	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,23	82,23	
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase potensi konflik ipoleksosbud yang ditangani	10%	10%	
	Indeks Demokrasi	64,12	64,12	IKU
Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	63,78%	63,78%	
	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	12,47%	12,47%	

TOTAL ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2018

Rp. 1.006.333.411.941,04,-

Pasuruan, 31 Oktober 2018

WAKIL WALIKOTA PASURUAN



RAHARTO TENO PRASETYO, ST



PRESTASI-PRESTASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018



SINDO WEEKLY



PENGHARGAAN WTP



PENGHARGAAN HARGANAS



SATYALANCANA PEMBANGUNAN



HARGANAS JAWA TIMUR



PENGHARGAAN KOTA LAYAK ANAK



TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK



PENGHARGAAN HAM



PENGHARGAAN GENDER